

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2019

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KOTA BANDA ACEH**

**Jl. Nyak Adam Kamil I No. 19A
Neusu Jaya Banda Aceh**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Banda Aceh, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Bappeda Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan Bappeda memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Bappeda. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), RTP intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi:

1. Pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi;
2. Penguatan lingkungan pengendalian;
3. Pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko;
5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya; dan
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Bappeda memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Bappeda.

Banda Aceh, 03 JANUARI 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH



Ir. GUSMERI, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19590816 19890303 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
E. Ruang Lingkup	2
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	3
A. Pengertian SPIP	3
B. Tujuan SPIP	3
C. Unsur-Unsur Dalam SPIP	3
BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BAPPEDA	5
A. Identifikasi Risiko.....	5
B. Analisis Risiko	5
C. Informasi dan Komunikasi	10
D. Pemantauan dan Evaluasi	12
BAB IV PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *Good Governance* melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Walikota tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Pemerintahan Kota Banda Aceh. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh.

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan BAPPEDA Kota Banda Aceh.

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi Bappeda secara efisien dan efektif;
5. Menjadi bahan pengendalian supaya pengelolaan keuangan dan aset dapat diselenggarakan secara handal; dan
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

E. RUANG LINGKUP

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2019.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. PENGERTIAN SPIP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

B. TUJUAN SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan Walikota/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Seperti telah disebutkan pada Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya oleh pihak eksternal.

BAB III
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2019 yang disusun Bappeda Kota Banda Aceh diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut: *Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.*

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yaitu:

Risiko atas pencapaian Tujuan:

1. Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD;
2. Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD;
3. Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD;
4. Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target; dan
5. Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Selain risiko dalam pencapaian tujuan strategis Bappeda Kota Banda Aceh, terdapat risiko operasional yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan utama organisasi yaitu:

1. Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan;
2. Data pendukung perencanaan tidak lengkap;
3. Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
4. Terhambatnya proses penyediaan data spatial;
5. Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal;
6. Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral;
7. Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh;
8. Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini;
9. Terkendalanya penyusunan dokumen evaluasi RPJP;

10. Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang;
11. Terhambatnya dalam penyusunan laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan;
12. Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang;
13. Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker;
14. Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan;
15. Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan;
16. Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan;
17. Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder; dan
18. Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun Daftar Risiko Teridentifikasi diuraikan dalam Lampiran 1.

B. ANALISIS RISIKO

Skala	Level Risiko	Kemungkinan
1	Sangat jarang	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10%) atau 1 kali dalam 5 tahun
2	Kemungkinan kecil/ Jarang	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 40% atau 2 kali dalam 5 tahun
3	Kemungkinan besar/ Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 - 70% atau 3 kali dalam 5 tahun),
4	Hampir pasti terjadi/ Sangat sering	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 4 kali dalam 5 Tahun)

Skala	Level Risiko	Dampak
1	Tidak signifikan/ Sangat kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan tidak signifikan.
2	Kurang signifikan/ Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan rendah/kurang signifikan.
3	Signifikan/Besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan tinggi/signifikan.
4	Sangat signifikan/ Sangat besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan urusan sangat signifikan.

Level risiko pada BAPPEDA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Analisis risiko dilakukan dengan *Focused Group Discussion* (FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pegawai Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil analisis atas risiko-risiko tersebut ditampilkan dalam bentuk peta risiko sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4		RO-2	RSO-5, RO-5, RO-10, RO-12, RO-13	RO-1, RO-11
	Kemungkinan besar	3		RO-7, RO-8	RO-4, RO-14	RO-17, RO-18
	Kemungkinan kecil	2			RO-6	RSO-1, RSO-4, RO-15, RO-16
	Sangat jarang	1				RSO-2, RSO-3, RO-3, RO-9

Keterangan :	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

Dari peta risiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 9 (sembilan) risiko yang mempunyai level sangat tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering/sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi, yaitu risiko:
 - a. Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RSO-5);
 - b. Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan (RO-1);
 - c. Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal (RO-5);
 - d. Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang (RO-10);

- e. Terhambatnya dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan (RO-11);
 - f. Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang (RO-12);
 - g. Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan Raker (RO-13);
 - h. Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder (RO-17); dan
 - i. Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (RO-18).
2. Terdapat 10 (sepuluh) risiko yang mempunyai level tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering dan dampak yang ditimbulkan tinggi, yaitu risiko:
- a. Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD (RSO-1);
 - b. Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target (RSO-4);
 - c. Data pendukung perencanaan tidak lengkap (RO-2);
 - d. Terhambatnya proses penyediaan data spatial (RO-4);
 - e. Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral (RO-6);
 - f. Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh (RO-7);
 - g. Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini (RO-8);
 - h. Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan (RO-14);
 - i. Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan (RO-15); dan
 - j. Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan (RO-16).
3. Terdapat 4 (empat) risiko yang mempunyai level rendah yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu risiko:
- a. Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD (RSO-2);
 - b. Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD (RSO-3);
 - c. Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi (RO-3); dan
 - d. Terkendalanya penyusunan dokumen evaluasi RPJP.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko

benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
Resiko Strategis		
1	Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait
2	Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait
3	Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait
4	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah
5	Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota

Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
Resiko Operasional		
1	Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Berkoordinasi kembali dengan OPD terkait
2	Data pendukung perencanaan tidak lengkap	Menyurati OPD terkait lainnya untuk mendapatkan data pendukung
3	Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan para akademisi dan OPD terkait
4	Terhambatnya proses penyediaan data spasial	Adanya pakta integritas kepada peserta pelatihan dan pemberian anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa pihak ketiga
5	Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal	Mengkonfirmasi langsung mengenai kesediaan data dengan OPD terkait
6	Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat secara berkelanjutan
7	Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	Menyurati pemilik lahan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan strategis dan cepat tumbuh

Pernyataan Risiko		Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
8	Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini	Mengkonfirmasi langsung bahan/data yang diperlukan dengan anggota pokja sanitasi pada OPD terkait
9	Terkendalanya penyusunan dokumen evaluasi RPJP	Menetapkan indikator pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP yang dapat diukur untuk memudahkan evaluasi
10	Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang	Menyurati peserta secara khusus untuk dapat hadir
11	Terhambatnya dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan	Berkomunikasi dengan OPD terkait terhadap kendali atau hambatan yang terjadi terhadap target rencana dan target realisasi fisik pembangunan
12	Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang	Adanya pakta integritas antara stakeholder dan OPD terkait dan mengadakan pertemuan Pra Musrena untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang
13	Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker	Menyurati dinas untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum diadakan pertemuan evaluasi raker
14	Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan	Menyurati anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
15	Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan
16	Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan
17	Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder	Menyusun dan menyampaikan hasil notulensi rapat kepada stakeholder terkait
18	Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Melakukan koordinasi antara tim pengendali dengan OPD terkait mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 2.

C. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi
1	2	3
I	RISIKO STRATEGIS OPD	
1	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
2	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
3	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
4	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran
5	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota	Aplikasi E-Musrenbang dan Pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kota
II	RISIKO OPERASIONAL	
1	Berkoordinasi kembali dengan OPD terkait	Surat dan e-mail
2	Menyurati OPD terkait lainnya untuk mendapatkan data pendukung	Surat pemberitahuan
3	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan para akademisi dan OPD terkait	Surat pemberitahuan pertemuan
4	Adanya pakta integritas kepada peserta pelatihan dan pemberian anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa pihak ketiga	Surat Pakta Integritas dan Surat telaahan staf untuk penambahan anggaran
5	Mengkonfirmasi langsung mengenai kesediaan data dengan OPD terkait	Surat pemberitahuan
6	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat secara berkelanjutan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan
7	Menyurati pemilik lahan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan strategis dan cepat tumbuh	Surat pemberitahuan
8	Mengkonfirmasi langsung bahan/data yang diperlukan dengan anggota pokja sanitasi pada OPD terkait	mengirimkan form-form data yang harus diisi kepada anggota pokja melalui surat elektronik
9	Menetapkan indikator pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP yang dapat diukur untuk memudahkan evaluasi	Memasukkan indikator yang diukur kedalam indikator target pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP
10	Menyurati peserta secara khusus untuk dapat hadir	Surat undangan dan melalui aplikasi handphone (WhatsApp)
11	Berkomunikasi dengan OPD terkait terhadap kendali atau hambatan yang terjadi terhadap target rencana dan target realisasi fisik pembangunan	Surat pemberitahuan dan e-mail
12	Adanya pakta integritas antara stakeholder dan OPD terkait dan mengadakan pertemuan Pra Musrena untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang	Surat Pakta Integritas antara stakeholder dan OPD terkait serta Surat telaahan staf untuk penambahan anggaran pelaksanaan pertemuan Pra-Musrena
13	Menyurati dinas untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum diadakan pertemuan evaluasi raker	Surat undangan dan pemberitahuan pertemuan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi
1	2	3
14	Menyurati anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	Surat undangan, sms gateway dan menghubungi langsung via telpon
15	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan
16	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan
17	Menyusun dan menyampaikan hasil notulensi rapat kepada stakeholder terkait	Surat undangan atau pemberitahuan melalui e-mail
18	Melakukan koordinasi antara tim pengendali dengan OPD terkait mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 3.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reviu. Pemantauan yang berkelanjutan atas pengendalian, kemudian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Asistensi dan Rapat pertemuan;
- 2) Menverifikasi terhadap Renstra OPD Seleksi Jabatan Struktural;
- 3) Menverifikasi terhadap Renja OPD;
- 4) Menverifikasi usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pembangunan melalui aplikasi E-Musrenbang;
- 5) Menyusun Laporan Kegiatan;
- 6) Menyusun laporan hasil survey;
- 7) Mengecek pengisian form data yang telah dikembalikan;

- 8) Melakukan pengecekan indikator capaian dengan data yang disediakan oleh OPD terkait atau melalui data dari BPS;
- 9) Menyusun Buku Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembangunan;
- 10) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder dan OPD terkait;
- 11) Menyusun laporan evaluasi raker dan aplikasi ev-raker; dan
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD);

Rincian metode pemantauan yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Banda Aceh.

Demikianlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Bappeda Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Bappeda Kota Banda Aceh.

BAB IV PENDAHULUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2019 merupakan uraian tentang upaya Bappeda untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola Bappeda.

Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen yang terus menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Bappeda. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan Bappeda kota Banda Aceh.

FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DAN OPERASIONAL BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Periode Penilaian: 2019

OPD : BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

I. Risiko Strategis OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab		C/UC	Dampak	
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1	Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Kepala BAPPEDA	Masih belum selarasnya program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RPJMD dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang diusulkan oleh OPD dalam dokumen RKPD	Internal/Eksternal	C	Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD yang tidak menunjang pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2	Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD	RSO-2	Kepala BAPPEDA	Masih adanya Penyusunan Renstra OPD yang belum berpedoman pada dokumen RPJM	Internal/Eksternal	C	Ketidaksesuaian rencana strategis OPD untuk mendukung rencana strategis RPJMD	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3	Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO-3	Kepala BAPPEDA	Masih adanya Penyusunan Renja OPD yang belum berpedoman pada dokumen RPKK	Internal/Eksternal	C	Ketidaksesuaian rencana kerja OPD untuk mendukung rencana kerja pemerintah Kota	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target	RSO-4	Kepala BAPPEDA	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang diusulkan oleh OPD yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai	Internal/Eksternal	C	Mempengaruhi target-target keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5	Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan	RSO-5	Kepala BAPPEDA	Belum sesuainya usulan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan	Internal/Eksternal	C	Adanya usulan masyarakat yang tidak dapat diakomodir dalam aplikasi perencanaan	Pemerintah Kota Banda Aceh

II. Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab		C/UC	Dampak	
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11
1	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1	Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	RO-1	Bidang Litbang	Sulitnya pencarian data yang sesuai dengan tupoksi OPD terkait	OPD Terkait	C	Laporan/data informasi yang dihasilkan tidak lengkap	Bappeda, Pemerintah Kota Banda Aceh
2	Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	2	Data pendukung perencanaan tidak lengkap	RO-2	Bidang Litbang	OPD tidak menyerahkan laporan tepat waktu	OPD Terkait	C	Laporan/data untuk penyusunan dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak lengkap	Bappeda
3	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	RO-3	Bidang Ekonomi dan SDA	Terlambatnya pelaksanaan perjanjian kerja atau kontrak dengan pihak ketiga	Bappeda	C	Penyusunan Laporan informasi perencanaan ekonomi yang tidak tepat waktu	Bappeda
4	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial	4	Terhambatnya proses penyediaan data spatial	RO-4	UPTB GIS	1. Kekurangan Sumber daya Surveyor dan keterbatasan peralatan survey	Bappeda	C	Target penyelesaian peta spatial yang tidak tepat waktu	Bappeda, Pemerintah Kota Banda Aceh
							2. Belum tersedianya peralatan GPS Geodetik	Bappeda	C	Mempengaruhi akurasi data peta spatial.	
5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	5	Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal	RO-5	Bidang Litbang	Data pendukung lintas OPD yang tidak optimal	Tim lintas OPD terkait	C	Laporan hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan dokumen perencanaan tidak optimal	Bappeda
6	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	6	Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral	RO-6	Bidang perencanaan pembangunan SDM dan Keistimewaan	Kapasitas SDM di OPD yang belum memadai	Tim lintas OPD terkait	C	Pelaksanaan Kerjasama hanya sebatas perencanaan tanpa tindakan lebih lanjut	Bappeda, Pemerintah Kota Banda Aceh
7	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	7	Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	RO-7	Bidang PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Masyarakat pemilik lahan yang sulit ditemui	Masyarakat setempat	C	Laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh tidak selesai tepat waktu	Bappeda, Stakeholder, Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab		C/UC	Dampak	
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
8	Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	8	Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini	RO-8	Bidang PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perbedaan data antar dokumen yang ada sehingga harus melakukan sinkronisasi ke OPD terkait	Tim lintas OPD terkait	C	Penyusunan dokumen pemutakhiran SSK bergeser dari jadwal yang dibuat	Bappeda, Stakeholder, Pemerintah Kota Banda Aceh
9	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen Evaluasi RPJP	9	Terkendalanya penyusunan dokumen evaluasi RPJP	RO-9	Bidang Litbang	Perbedaan Format penyusunan RPJP yang telah ditetapkan dengan format penyusunan evaluasi RPJP sesuai dengan peraturan terbaru	Bappeda	C	Target penyelesaian penyusunan dokumen evaluasi RPJP yang tidak tepat waktu	Bappeda, Pemerintah Kota Banda Aceh
10	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	10	Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang	RO-10	Bidang Litbang	Kurangnya sosialisasi dari operator E-Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan terhadap para stakeholder (LSM atau NGO).	Operator E-Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan	C	Usulan dari berbagai stakeholder (LSM atau NGO) tidak tertampung dalam aplikasi E-Musrenbang	Bappeda, Stakeholder, Pemerintah Kota Banda Aceh
11	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	11	Terhambatnya dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan	RO-11	Bidang Litbang	1. Data yang diberikan oleh OPD tidak sinkron dengan data eksisting	OPD	C	Kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target dan tujuan perencanaan	Bappeda, Stakeholder
							2. OPD tidak menyerahkan laporan tepat waktu	OPD	C	Laporan yang dihasilkan tidak valid	Bappeda, Stakeholder
12	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	12	Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang	RO-12	Bidang SDM dan Keistimewaan	OPD terkait tidak mengupdate usulan pada kamus usulan	OPD	C	Usulan dari berbagai stakeholder tidak tertampung dalam aplikasi E-Musrenbang	Bappeda, Stakeholder, Pemerintah Kota Banda Aceh
13	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	13	Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker	RO-13		OPD tidak menyerahkan laporan tepat waktu	OPD		Terlambatnya penyusunan laporan evaluasi Raker	Bappeda, Pemerintah Kota Banda Aceh
14	Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	14	Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan	RO-14	Bidang Ekonomi dan SDA	OPD terkait terlambat menyampaikan laporan penanggulangan kemiskinan	OPD Terkait	C	Penyusunan Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) yang tidak tepat waktu	Bappeda, Pemerintah Kota Banda Aceh
15	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Masterplan Pendidikan	15	Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan	RO-15	Bidang SDM dan Keistimewaan	Belum adanya sumber data yang terpusat (Data masih tersebar di berbagai OPD)	OPD Terkait	C	Terhambatnya Penyusunan Dokumen Masterplan Pendidikan	Bappeda, stakeholder dan pemerintah Kota Banda Aceh

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab		C/UC	Dampak	
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11
16	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan	Jumlah Dokumen Masterplan Kesehatan	16	Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan	RO-16	Bidang SDM dan Keistimewaan	Belum adanya sumber data yang terpusat (Data masih tersebar di berbagai OPD)	OPD Terkait	C	Terhambatnya Penyusunan Dokumen Masterplan Kesehatan	Bappeda, stakeholder dan pemerintah Kota Banda Aceh
17	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	17	Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder	RO-17	Bidang SDM dan Keistimewaan	Kurangnya komitmen dari stakeholder	OPD Terkait	C	Terhambatnya monitoring dan evaluasi pencapaian Grand Design Pembangunan Kependudukan	Bappeda, stakeholder dan pemerintah Kota Banda Aceh
18	Pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	18	Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	RO-18	Bidang SDM dan Keistimewaan	Belum adanya Tim penyusun Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan dalam pencapaian pengendalian tujuan pembangunan berkelanjutan	Tim lintas sektoral	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengendalian tujuan pembangunan berkelanjutan	Bappeda, stakeholder dan pemerintah Kota Banda Aceh

FORMULIR KERTAS KERJA
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
SERTA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Periode Penilaian: 2019

OPD : BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	CELAH PENGENDALIAN	PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	RISIKO STRATEGIS OPD							
1	Masih belum selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Mengawal program RPKK supaya sesuai dengan program RPJMD	Efektif	Adanya program pusat/propinsi yang harus dilaksanakan oleh daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Bappeda	Triwulan II
2	Masih belum selarasnya Renstra OPD terhadap RPJMD	RSO-2	Mengawal program dan kegiatan Renstra OPD supaya sesuai dengan program RPJMD	Efektif	Adanya program pusat/propinsi yang harus dilaksanakan oleh daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Bappeda	
3	Masih belum selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO-3	Menjamin kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD dengan program dan kegiatan RKPD	Efektif	Adanya program pusat/propinsi yang harus dilaksanakan oleh daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Bappeda	Triwulan II
4	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang belum mencapai target	RSO-4	Mengawal OPD agar target indikator kinerja Daerah dapat tercapai	Efektif	Pengaruh internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah	Bappeda	Triwulan IV
5	Masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi perencanaan yang disebabkan usulan belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan	RSO-5	Mensosialisasikan prioritas pembangunan kepada masyarakat	Efektif	Tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota	Bappeda	Triwulan I
II	RISIKO OPERASIONAL							
1	Terhambatnya pengumpulan dan updating data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	RO-1	Menyurati dan berkoordinasi dengan OPD terkait	Efektif	Data yang diinput oleh operator OPD tidak sesuai dengan yang diharapkan	Berkoordinasi kembali dengan OPD terkait	Bappeda	Triwulan IV
2	Data pendukung perencanaan tidak lengkap	RO-2	Berkoordinasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan data pendukung perencanaan dari OPD terkait	Efektif	OPD yang terkait tidak dapat menyediakan data yang diinginkan	Menyurati OPD terkait lainnya untuk mendapatkan data pendukung	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan III
3	Terhambatnya pelaksanaan survey untuk analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	RO-3	Berkoordinasi secara berkesinambungan dengan para akademisi dan OPD terkait	Efektif	Sulitnya mengadakan pertemuan dengan para akademisi	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan para akademisi dan OPD terkait	Bidang PP Ekonomi dan SDA	Triwulan IV
4	Terhambatnya proses penyediaan data spatial	RO-4	Pelatihan ASN untuk menjadi tenaga surveyor serta menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengumpulan data	Efektif	Komitmen peserta pelatihan dan belum maksimalnya anggaran untuk menggunakan jasa pihak ketiga	Adanya pakta integritas kepada peserta pelatihan dan pemberian anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa pihak ketiga	Bappeda	Triwulan IV

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	CELAH PENGENDALIAN	PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pengumpulan data hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal	RO-5	Mengumpulkan data dari OPD terkait hasil penelitian dan pengembangan	Efektif	Lambatnya respon OPD terkait untuk menyerahkan data	Mengkonfirmasi langsung mengenai kesediaan data dengan OPD terkait	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan IV
6	Terhambatnya proses transfer pengetahuan pelaksanaan kerjasama lintas sektoral	RO-6	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat	Efektif	Aparatur yang terlibat dalam proses kerjasama lintas sektoral sering berganti	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat secara berkelanjutan	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan IV
7	Pengumpulan data lapangan yang kurang akurat untuk Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	RO-7	Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/gampong setempat	Efektif	Sebahagian pemilik lahan berkemungkinan bukan warga desa/gampong setempat	Menyurati pemilik lahan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan strategis dan cepat tumbuh	Bidang PP Infrastruktur dan pembangan wilayah	Triwulan II
8	Data teknis yang belum lengkap terkait kondisi sanitasi saat ini	RO-8	Melakukan rapat koordinasi Pokja sanitasi kota	Efektif	Komitmen anggota Pokja sanitasi untuk hadir dalam rapat koordinasi	Mengkonfirmasi langsung bahan/data yang diperlukan dengan anggota pokja sanitasi pada OPD terkait	Bidang PP Infrastruktur dan pembangan wilayah	Triwulan III
9	Terkendalanya penyusunan dokumen evaluasi RPJP	RO-9	Meningkatkan kualitas penyusunan evaluasi RPJP	Efektif	Indikator pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP yang sulit diukur	Menetapkan indikator pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP yang dapat diukur untuk memudahkan evaluasi	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan IV
10	Rendahnya pemahaman stakeholder (LSM atau NGO) dalam mengajukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang	RO-10	Pelatihan untuk mengisi Aplikasi E-Musrenbang khusus untuk NGO atau LSM terkait	Efektif	Komitmen peserta pelatihan yang belum maksimal	Menyurati peserta secara khusus untuk dapat hadir	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan I
11	Terhambatnya dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan	RO-11	Memonitor secara berkala pelaksanaan pembangunan	Efektif	Data target rencana dan target realisasi fisik sering tidak tercapai	Berkomunikasi dengan OPD terkait terhadap kendali atau hambatan yang terjadi terhadap target rencana dan target realisasi fisik pembangunan	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan IV
12	Belum semua usulan Stakeholder (perempuan, anak dan penyandang disabilitas) terdapat dalam aplikasi E-Musrenbang	RO-12	Mengadakan pertemuan antara stakeholder dan OPD terkait untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang untuk kegiatan Musrena	Efektif	Kurangnya komitmen stakeholder dan OPD terkait untuk menghadiri pertemuan	Adanya pakta integritas antara stakeholder dan OPD terkait dan mengadakan pertemuan Pra Musrena untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan IV
13	Terhambatnya Laporan evaluasi pelaksanaan raker	RO-13	Mengadakan pertemuan secara berkala dengan OPD terkait	Efektif	Data yang dilampirkan oleh OPD terkait belum lengkap	Menyurati dinas untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum diadakan pertemuan evaluasi raker	Sekretariat	Triwulan IV

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	CELAH PENGENDALIAN	PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Lambatnya laporan penanggulangan kemiskinan	RO-14	Mengadakan rapat koordinasi untuk membahas tercapainya realisasi fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi.	Efektif	kurangnya komitmen anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi	Menyurati anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	Bidang PP Ekonomi dan SDA	Triwulan IV
15	Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan	RO-15	Mengumpulkan bahan/data Otsus dan DAK bidang pendidikan dari OPD pendidikan dan Bappeda Aceh	Efektif	Waktu pengumpulan bahan/data yang terlambat yang disebabkan oleh pengarsipan yang belum terpadu	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan III
16	Terhambatnya dalam pengumpulan data alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan	RO-16	Mengumpulkan bahan/data Otsus dan DAK bidang kesehatan dari OPD Kesehatan dan Bappeda Aceh	Efektif	Waktu pengumpulan bahan/data yang terlambat yang disebabkan oleh pengarsipan yang belum terpadu	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan IV
17	Kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder	RO-17	Mengadakan Rapat Koordinasi bulanan dengan stakeholder terkait	Efektif	Kurangnya komitmen OPD terkait untuk menghadiri pertemuan/rapat	Menyusun dan menyampaikan hasil notulensi rapat kepada stakeholder terkait	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan III
18	Belum adanya Rencana Aksi Daerah dari pihak Non Permerintah yang menjadi acuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	RO-18	Mengadakan kerjasama dengan LSM terkait untuk pengendalian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kota Banda Aceh	Efektif	Kurang optimalnya SDM mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan	Melakukan koordinasi antara tim pengendali dengan OPD terkait mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan IV

FORMULIR KERTAS KERJA PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Periode Penilaian: 2019

OPD : BAPPEDA KOTA Banda Aceh

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
I	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 1 dan 2
2	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran	Bappeda	OPD terkait	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan
3	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran	Bappeda	OPD terkait	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan
4	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah	Asistensi, Rapat pertemuan, Surat edaran	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 2 dan 4
5	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota	Aplikasi E-Musrenbang dan Pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kota	Bappeda	Elemen masyarakat dan OPD terkait	Triwulan 1
II	RISIKO OPERASIONAL				
1	Berkoordinasi kembali dengan OPD terkait	Surat dan e-mail	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 2 dan 4
2	Menyurati OPD terkait lainnya untuk mendapatkan data pendukung	Surat pemberitahuan	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 2
3	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan para akademisi dan OPD terkait	Surat pemberitahuan pertemuan	Bappeda	Para akademisi dan OPD terkait	Triwulan 2 dan 3
4	Adanya pakta integritas kepada peserta pelatihan dan pemberian anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa pihak ketiga	Surat Pakta Integritas dan Surat telaahan staf untuk penambahan anggaran	Bappeda	Peserta Pelatihan dan Tim TAPD	Triwulan 3 dan 4
5	Mengkonfirmasi langsung mengenai kesediaan data dengan OPD terkait	Surat pemberitahuan	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 3 dan 4
6	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat secara berkelanjutan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 3 dan 5

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
7	Menyurati pemilik lahan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan strategis dan cepat tumbuh	Surat pemberitahuan	Bappeda	Masyarakat pemilik lahan RTH	Triwulan 2
8	Mengkonfirmasi langsung bahan/data yang diperlukan dengan anggota pokja sanitasi pada OPD terkait	mengirimkan form-form data yang harus diisi kepada anggota pokja melalui surat elektronik	Bappeda	Anggota pokja sanitasi yang ada pada masing-masing OPD terkait	Triwulan 2 dan 3
9	Menetapkan indikator pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP yang dapat diukur untuk memudahkan evaluasi	Memasukkan indikator yang diukur kedalam indikator target pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP	Bappeda	Dokumen RPJP	Triwulan 2
10	Menyurati peserta secara khusus untuk dapat hadir	Surat undangan dan melalui aplikasi telpon	Bappeda	Peserta Pelatihan dari LSM (NGO)	Triwulan 1
11	Berkomunikasi dengan OPD terkait terhadap kendala atau hambatan yang terjadi terhadap target rencana dan target realisasi fisik pembangunan	Surat pemberitahuan dan e-mail	Bappeda	OPD pelaksana pembangunan	Triwulan 2 sampai 4
12	Adanya pakta integritas antara stakeholder dan OPD terkait dan mengadakan pertemuan Pra Musrena untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang	Surat Pakta Integritas antara stakeholder dan OPD terkait serta Surat telaahan staf untuk penambahan anggaran pelaksanaan pertemuan Pra-Musrena	Bappeda	stakeholder dan OPD terkait serta Tim TAPD	Triwulan 3 dan 4
13	Menyurati dinas untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum diadakan pertemuan evaluasi raker	Surat undangan dan pemberitahuan pertemuan	Bappeda	OPD terkait	Triwulan 3
14	Menyurati anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	surat undangan, sms gateway dan menghubungi langsung via telpon	Bappeda	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh	Triwulan 1 sampai 4
15	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Pendidikan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan	Bappeda	OPD terkait pendidikan dan Bappeda Aceh	Triwulan 2
16	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi dana OTSUS dan DAK Bidang Kesehatan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan	Bappeda	OPD terkait kesehatan dan Bappeda Aceh	Triwulan 3
17	Menyusun dan menyampaikan hasil notulensi rapat kepada stakeholder terkait	Surat undangan atau pemberitahuan melalui e-mail	Bappeda	stakeholder dan OPD terkait	Triwulan 2
18	Melakukan koordinasi antara tim pengendali dengan OPD terkait mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Rapat pertemuan dan surat pemberitahuan	Bappeda	Tim pengendali dan OPD terkait	Triwulan 3

FORMULIR KERTAS KERJA

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Periode Penilaian: 2019

OPD : BAPPEDA KOTA BANDARA ACEH

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	7	8
1	RISIKO STRATEGIS OPD			
1	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Asistensi dan Rapat pertemuan	Bappeda	Triwulan 1
2	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Menverifikasi terhadap Renstra OPD	Bappeda	Triwulan 2
3	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	Menverifikasi terhadap Renja OPD	Bappeda	Triwulan 2
4	Mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja daerah dan/atau menyesuaikan target indikator kinerja daerah	Asistensi dan Rapat pertemuan	Bappeda	Triwulan 2 dan 4
5	Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan kota	Menverifikasi usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pembangunan melalui aplikasi E-Musrenbang	Bappeda	Triwulan 1 dan 2

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	7	8
II	RISIKO OPERASIONAL			
1	Berkoordinasi kembali dengan OPD terkait	Menyusun Laporan Kegiatan	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 3 dan 4
2	Menyurati OPD terkait lainnya untuk mendapatkan data pendukung	Menyusun laporan penginputan data	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 4
3	Menyesuaikan jadwal pertemuan dengan para akademisi dan OPD terkait	Menyusun laporan hasil survey	Bidang PP Ekonomi dan SDA	Triwulan 3
4	Adanya pakta integritas kepada peserta pelatihan dan pemberian anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa pihak ketiga	Menyusun Laporan Kegiatan	UPTB GIS	Triwulan 3 dan 4
5	Mengkonfirmasi langsung mengenai kesediaan data dengan OPD terkait	Menyusun Laporan Kegiatan	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 4

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	7	8
6	Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi OPD yang terlibat secara berkelanjutan	Laporan hasil kegiatan	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan 4
7	Menyurati pemilik lahan secara langsung untuk menyelesaikan	Laporan hasil kegiatan	Bidang PP Infrastruktur dan pembangunan wilayah	Triwulan 3
8	Mengkonfirmasi langsung bahan/data yang diperlukan dengan anggota pokja sanitasi pada OPD terkait	Mengecek pengisian form data yang telah dikembalikan	Bidang PP Infrastruktur dan pembangunan wilayah	Triwulan 2 dan 3
9	Menetapkan indikator pencapaian yang terdapat dalam dokumen RPJP yang dapat diukur untuk memudahkan evaluasi	Melakukan pengecekan indikator capaian dengan data yang disediakan oleh OPD terkait atau melalui data dari BPS	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 3 dan 4
10	Menyurati peserta secara khusus untuk dapat hadir	Memantau absensi kehadiran peserta pada musrenbang desa, kecamatan dan kota	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 1 dan 2

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	7	8
11	Berkomunikasi dengan OPD terkait terhadap kendali atau hambatan yang terjadi terhadap target rencana dan target realisasi fisik pembangunan	Menyusun Buku Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembangunan	Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 4
12	Adanya pakta integritas antara stakeholder dan OPD terkait dan mengadakan pertemuan Pra Musrena untuk membahas kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang	Koordinasi dan Komunikasi dengan stakeholder dan OPD terkait	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan 4
13	Menyurati dinas untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum diadakan pertemuan evaluasi raker	Laporan evaluasi raker dan aplikasi ev-raker	Sekretariat	Triwulan 4
14	Menyurati anggota tim untuk hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Bidang PP Ekonomi dan SDA	Triwulan 4
15	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi	Koordinasi dan Komunikasi dengan stakeholder dan OPD terkait	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan 3 dan 4
16	Pengumpulan bahan/data secara manual mengenai alokasi	Koordinasi dan Komunikasi dengan stakeholder dan OPD terkait	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan 3 dan 4
17	Menyusun dan menyampaikan hasil notulensi rapat kepada stakeholder terkait	Koordinasi dan Komunikasi dengan stakeholder dan OPD terkait	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan 2 dan 3
18	Melakukan koordinasi antara tim pengendali dengan OPD terkait mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Koordinasi dan Komunikasi antara tim pengendali dengan OPD terkait	Bidang PP SDM dan Keistimewaan	Triwulan 3 dan 4